

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Mengatakan bahwa perilaku tidak memiliki pengaruh yang sangat menentukan dalam jalannya proses politik merupakan suatu hal yang mustahil. Meski demikian sampai saat ini pun masih banyak peneliti dan ilmuwan politik yang tengah terlibat dalam perdebatan ini. Mengklaim bahwa perilaku belum dapat dikatakan sebagai tolak ukur yang dapat dipercaya atas sejauh mana proses politik dan perkembangan politik telah membawa peradaban manusia hingga saat ini. Banyak faktor lain dan variabel yang beragam mempengaruhi kehidupan proses berpolitik kita, sehingga untuk berpendapat bahwa kunci dari semua peristiwa dan gejala yang terjadi hanya tergantung pada satu faktor tentu saja kurang tepat. Yang paling penting ketika kita mengobservasi perilaku ialah, bukan perubahan besar yang otomatis mempengaruhi seluruh jalannya proses politik yang kita cari. Namun pergeseran kecil yang diakibatkan oleh kecenderungan manusia dalam berperilaku yang akhirnya tercermin pada dalam kehidupan sehari-hari bahkan dalam kehidupan berproses politik mereka juga membentuk suatu pola. Pola inilah yang sebenarnya dapat membantu kita dalam segala hal, pola ini dapat memprediksi hasil maupun fenomena politik yang akan muncul. Dengan begitulah, kita akan dapat mengetahui pergesekan dan gejolak apa yang mengakibatkan fenomena atau peristiwa-peristiwa ini muncul ke permukaan.

Peneliti David Easton juga mengungkapkan pendapat bahwa studi perilaku juga menjadi suatu hal yang masih dianggap lamban dalam perkembangan ilmu studi politik, jika dibandingkan dengan studi sosial yang lain. Mungkin studi perilaku pada masanya masih belum diapresiasi dan dinilai lebih. Maka sudah saatnya studi ilmu politik mulai mengembangkan area penelitian untuk menemukan instruksi-intstruksi penting mengenai perilaku dalam studi ilmu politik yang dapat membuahkan riset mendalam tentang studi perilaku politik.¹

¹Easton, D. *The Political System: An Inquiry into the State of Political Science*. New York: Knopf, 1953.

Perilaku politik terhadap fenomena-fenomena tertentu akan mengembangkan pola pikir dan solusi untuk mempertimbangkan langkah-langkah selanjutnya dalam penentuan keputusan. Akan banyak ditemui situasi yang menghadapkan negara ataupun masyarakat pada keputusan politik yang harus mereka tentukan kedepannya. Perilaku masyarakat menyikapi fenomena-fenomena yang ada disekitar menjadi percikan yang mengarah kepada suatu kecenderungan dalam menentukan segala keputusan politik mereka. Sehingga penting bagi kita untuk meneliti perilaku masyarakat dan menghubungkannya dengan sikap kecenderungan mereka terhadap fenomena tersebut. Betapa signifikan peran suatu fenomena yang terjadi pada saat itu juga mempengaruhi pola pikir masyarakat. Seseorang dengan keputusan politik A bisa dengan mudah berganti menjadi B jika dia memutuskan untuk menyikapi suatu fenomena dengan perilaku yang berbeda, melahirkan pola pikir yang berbeda.

Dengan berjuta fenomena yang ada maka perilaku dan metode yang digunakan oleh seseorang dalam menyikapi hal tersebut juga menjadi beragam. Yang terpenting dan tetap kita pegang sebagai kunci adalah studi perilaku tidak diragukan lagi memegang peran penting dalam studi ilmu politik. Sudah saatnya peneliti mengakui bahwa studi perilaku politik masih sangat relevan dan dapat dilakukan studi lebih lanjut dalam bidangnya untuk menemukan variabel-variabel baru. Menyumbang lebih jauh lagi dalam perluasan area studi ilmu politik dan secara menyeluruh pada dunia perpolitikan saat ini.

Konsep patrimonialisme, bentuk kepemimpinan yang identik oleh seorang tokoh *father-figure* diangkat sebagai pemimpin adalah suatu bentuk fenomena yang akan kita bahas. Dalam lingkup politik nasional, banyak contoh periode kepemimpinan yang sangat identic dengan sistem patrimonial. Bentuk-bentuk patrimonialisme tradisional bahkan masih ditemui di era Demokrasi Terpimpin. Unsur tradisional ini muncul ketika demokrasi tepimpin berhasil menggantikan sistem parlementer di Indonesia pada tahun 1959. Pada masa itu Soekarno berdiri ditengah sistem demokrasi terpimpin sebagai pemimpin yang masih memegang kepercayaan masyarakat bahwa beliau sebagai pembawa *wahyu* yang telah dianugerahkan padanya ditakdirkan untuk memimpin.

Konsep yang bersifat tradisional namun sangat dipahami oleh masyarakat, sehingga dari proyeksi tersebut mereka melihat sosok Soekarno sebagai pemimpin yang ditakdirkan membawa Indonesia kembali ke kejayaannya. Proyeksi kekuatan tersebut juga digambarkan dengan kemegahan Istana Merdeka, dengan berbagai perayaan dan selebrasi, serta pembangunan monument nasional. Bertujuan untuk menunjukkan kepada massa bahwa Soekarno masih memegang *wahyu* dan memiliki kekuasaan.²

Namun patrimonial tradisional tidak selamanya dapat memberikan stabilitas pada Demokrasi Terpimpin pada masanya. Masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki pandangan politik dan sangat bersifat pasif mulai menunjukkan gejala dalam bidang politik. Pada tahun 1960-an Partai Komunis Indonesia (PKI) telah mengundang banyak minat para masyarakat khususnya warga miskin pedesaan untuk memperjuangkan hak kepentingan mereka. Sehingga massa yang sebelumnya hanya dianggap sebagai bidak pasif tidak memiliki orientasi politik, tidak memiliki pengetahuan politik, secara tiba-tiba berideologi dan memiliki pandangan politik dan mampu berorientasi. Mereka memutuskan untuk melakukan aksi unilateral dan perlawanan pada property-property milik penjajah kolonial Belanda, Amerika, dan Inggris.

Semakin menguatnya PKI membuat partai lawan mulai bergejolak untuk melindungi diri mereka. Nasionalis dan partai religius bangkit untuk melawan pergerakan PKI. Soekarno semakin memiliki alasan kuat untuk menggunakan kekuatan militer sebagai kekuatan koersif. Kekuatan militer dan PKI saling mengimbangi satu sama lain sebagai rival pada saat itu. Soekarno berusaha keras menjaga 3 unsur yakni nasionalis, komunis, agamis, untuk tetap stabil dan menyokong sistem demokrasi terpimpin yang telah dibangun. Namun beliau tidak memiliki kekuatan yang cukup besar untuk mempengaruhi rekonsiliasi antara faksi-faksi tersebut. Akronim populer yang digawang Soekarno pada masanya yakni NASAKOM (Nasionalis, Agama, Komunis) tidak cukup untuk menyatukan tiga unsur tersebut. Masing-masing kelompok membenci satu sama lain, dengan ideology dan pandangan yang saling bergesekan dan tidak menemui tujuan

²Geertz, C. *Islam Observed: Religious Development in Morocco and Indonesia*. New Haven: Yale University Press, 1968.

bersama. Puncaknya pada 1965 PKI memberlakukan aksi kudeta pada jenderal-jenderal militer. Menimbulkan pembantaian oleh pihak militer kepada PKI dan PKI terhadap para jenderal pemimpin militer. Tercatat dalam sejarah panjang Indonesia sebagai peristiwa *30 September Movement* (G30S PKI). Patrimonial tradisional terbukti gagal mempertahankan sistem demokrasi dipimpin Soekarno.

Ideologi dan pandangan yang sangat berlawanan dan tidak dapat disatukan berkompetisi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan masing-masing pada skala nasional dan mengakibatkan tragedi nasional. Sepertinya patrimonial tradisional pada demokrasi dipimpin berdiri di atas institusi yang bersifat non-patrimonial. Masyarakat yang dapat memiliki afiliasi politik dan tidak lagi bersifat pasif sangat kontras dengan sifat massa pada patrimonial tradisional yang seharusnya. Maka pada masa itu, patrimonialisme gagal mempertahankan suatu pemerintahan.

Transisi demokrasi yang dialami oleh Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin juga merupakan indikasi munculnya sistem patrimonialisme. Seperti yang terjadi pada negara-negara Soviet Union ketika rezim komunis Soviet jatuh dan upaya demokratisasi marak diantara negara Soviet Union. Beberapa model demokratisasi modern yang tengah dibangun dan belum mencapai model seutuhnya pada negara-negara *post-Soviet* membentuk hubungan neo-patrimonial tradisional yang bukan merupakan tujuan dari transisi demokrasi negara *post-Soviet*. Mengindikasikan bahwa sebenarnya model patrimonialisme sudah ada jauh sebelum rezim Soviet jatuh. Kerangka model patrimonial sudah ada pada negara-negara *post-Soviet*. Ketika negara-negara ini mengejar transisi demokrasi mengharapkan pembaharuan dan modifikasi untuk mencapai demokrasi, yang terbentuk malah bentuk baru dominasi semi-patrimonial. Transisi demokrasi yang terjadi pada negara *post-Soviet* tumbuh di atas struktur yang sudah mengandung unsur patrimonial bahkan sebelum rezim itu jatuh. Sehingga unsur patrimonial tersebut sangat menentukan pembentukan struktur demokrasi yang terjadi, melahirkan suatu bentuk sistem baru yakni model neopatrimonial.

Dalam rezim neopatrimonial seorang pemimpin dapat menguasai kontrol penuh atas aspek ekonomi dan politis dalam kehidupan bernegara. Hubungan

patron-client sangat penting dalam pendistribusian sumber dan kekuasaan. Struktur neopatrimonial memperbolehkan pemilik kuasa untuk melakukan pengembangan dan modifikasi formasi institusi seperti kompetisi elektoral yang menguntungkan pihak berkuasa. Sistem multipartai dan parlemen, hingga konstitusi modern semua dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kepentingan sang penguasa dan bawahannya. Simbiosis patrimonial ini membentuk struktur institusi formal dan sistem politik suatu negara seakan bertindak mendukung kepentingannya. Dengan mesin patrimonial, perubahan konstitusi dan peraturan sistem elektoral suatu negara dapat secara otomatis diubah agar lebih menyesuaikan kepentingan sang penguasa. Maka neopatrimonial sering kali dapat merubah arah pertarungan politik menjadi *zero sum game (winner-take-all)*.³

Posisi presiden sebagai penguasa memegang semua kunci kontrol diatas politik dan industri yang bersifat menguntungkan ekonomi negara. Juga menguntungkan dalam hal privat karena sistem patrimonial diidentikan oleh aset pribadi dan publik yang tak terpisahkan (*indivisible*). Penguasa akan berusaha mendapatkan keuntungan dari industri ekonomi negara, mendukung kepentingan privatisasi penguasa tersebut.

Sementara menurut Weber, patriarki berdiri ditengah-tengah patrimonialisme. Memiliki spesifikasi yang khusus yakni pemerintahan yang berdasar pada kepemimpinan seorang *father figure* seperti yang dapat ditemui dalam suatu hubungan kekeluargaan. Administrasi politik dan rumah tangga negara dilakukan sejalan dengan sifat dan sistem yang banyak ditemui dalam lingkup keluarga rumah tangga. Atau bahkan, urusan negara serta politik didistribusikan didalam *inner circle* keluarga keturunan sang pemimpin itu sendiri. Dalam bukunya *Economy and Society*, konsep patrimonialisme Weber sangat berkontras dengan gagasan *rational-legal bureaucracy* miliknya yang bersifat impersonal dan bekerja secara efektif dan jelas. Memisahkan urusan privat dan publik, Weber menjelaskan *rational-legal bureaucracy* bekerja seperti

³Fisun, Oleksandr. "Developing Democracy or Competitive Neopatrimonialism? The Political Regime of Ukraine in Comparative Perspective", *Institution Building and Policy Making in Ukraine*. (2003).

mesin, memiliki presisi, dan sebuah mekanisme yang bekerja tanpa henti. Salah satu kontras yang sangat terlihat adalah pemisahan antara urusan publik dan privat.

Dalam patrimonialisme sendiri urusan publik dan privat tidak memiliki perbedaan, semua sektor publik berada dalam kontrol sang pemimpin sehingga seringkali penggunaannya ditujukan untuk memperkaya dan mendukung kepentingan pribadi mereka. Model patrimonial Weber sangat menyerupai sistem pemerintahan yakni pada rezim Soeharto ketika beliau memimpin zaman Orde Baru. Penggunaan sektor industri ekonomi negara untuk memperkaya keluarga pribadi mereka sendiri. Yang perlu kita observasi lagi adalah bagaimana konsep kebapakan ini dapat bertahan dan melawan segala perubahan tantangan zaman yang terjadi hingga saat ini.⁴

Bertahannya patrimonialisme dapat dikaitkan dengan kuat berdirinya patriarki menginfiltrasi segala aspek sosial, budaya, bahkan politik. Konsep patriarki memang sudah bertahan bahkan sejak zaman Roma kuno sampai saat ini berhasil membuat dan mengkonstruksi sistem secara spesifik menguntungkan konsep patriarki tersebut hingga sampai saat ini patriarki terus sukses berdiri mengalahkan seluruh tantangan zaman. Weber menegaskan bahwa wanita masih bergantung pada pria pada saat itu karena kondisi fisik dan intelektual mereka yang superior menurutnya. Klaim ini tentu saja tidak sesuai dengan agenda gender yang sudah maju dan berkembang pada zaman saat ini, Tentu saja jika Weber membicarakan hal lain yang membantu pria mendapat klaim posisi mereka yakni mungkin kemampuan mereka dalam pertarungan fisik dengan senjata apapun yang digunakan sesuai pada zamannya membantu mereka mendapatkan klaim mereka akan kekuasaan lebih kredibel.

Dibandingkan dengan argument awal Weber yang mendasarkan pendapatnya atas keadaan sosial. Julia Adams mengkritisi pendapat Weber akan dominasi patriarki berdasar atas status intelektual dan fisik, namun lebih menuju argument yakni budaya masa lalu Roma kuno dan kerajaan Eropa mendasarkan

⁴Weber, M. *Economy and Society*. Los Angeles: University of California Press. 1978.

klaim kekuasaan pada pertarungan perebutan takhta, sehingga pria dengan kapabilitas fisik yang mampu akan mendapatkan klaim dengan mudah. Instrumen argumen yang digunakan Weber kurang mendukung argumennya jika diimplikasikan pada konsep gender yang sudah berkembang seiring zaman bahkan hingga saat ini studi gender semakin memperluas lingkup studi melebar untuk mengakomodasi dan memberikan penjelasan pada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang baru terhadap studi tersebut.⁵ Maka sebenarnya membahas konsep patrimonialisme Weber dengan argumen orisinal yang masih belum mengalami perubahan menjadi sedikit tabu. Teori ini sangat perlu untuk direkonstruksi kembali, menyesuaikan dengan perkembangan studi-studi yang saat ini sudah semakin luas menjawab penelitian yang ada.

Untuk mengetahui mengapa hubungan patrimonial seringkali dikaitkan dalam peraduan kompetisi politik, kita harus mengetahui fakta bahwa praktik patrimonial sudah dilakukan sejak zaman awal kerajaan Eropa. Monarki Eropa menganggap bahwa kedudukan dan takhta yang telah diberikan kepada mereka berdasar pada *birth rights* mereka adalah kepemilikan mereka yang sah. Sukses yang berdasar pada keturunan berjenis kelamin laki-laki semakin menguatkan unsur patriarki dalam potret zaman awal kerajaan Eropa. Hamilton memperbandingkan daerah Eropa Barat dengan imperial Cina, dalam hal peranan serta kekuasaan pribadi. Dijelaskan bahwa pada masa imperial Cina perkataan *filial piety (xiao)* sangat melembaga pada saat itu yakni memiliki arti kekuatan sesungguhnya bukan berada di tangan sang pemimpin yang dianggap sebagai *bapak* namun lebih ke pekerja yang bersifat seperti *anak*. Tidak penting untuk seseorang memiliki peran dan kedudukan, bukan hal tersebut yang menjadi penting, namun bagaimana seseorang bekerja dibawah sang pemimpin tersebut memiliki kualitas dan bakti kepada pemimpin mereka. Perbandingan tersebut sangat menjelaskan perbedaan antara tatanan politik pada imperial Cina dan Eropa Barat.⁶

⁵Adams, J. "The Rule of The Father: Patriarchy and Patrimonialism in Early Modern Europe", *Max Weber's Economy and Society: a Critical Companion*. (2005):236-266.

⁶Hamilton, G. "Patriarchy, Patrimonialism, and Filial Piety: a Comparison of China and Western Europe", *British Journal of Sociology* 4, No. 3 (1990): 77-104.

Sehingga dapat kita ketahui patrimonialisme tidak begitu saja muncul, namun konsep tersebut melalui proses sejarah yang sangat panjang. Sejarah kita pula yang membentuk dan mengkonstruksi patrimonialisme sehingga menjadi suatu konsep yang kita ketahui sampai saat ini. Bagaimana patrimonialisme dapat mengatur arah tatanan politik di negara-negara *post-Soviet* seperti yang sudah kita bahas. Juga lahir dengan berbagai skenario dan sejarah yang tertulis sangat berbeda antara satu negara dengan negara lain. Antara imperial Cina dan Eropa Barat yang memiliki mungkin sedikit perbedaan namun keduanya tetap berdasar pada patriarki yang sudah tertanam di kehidupan masyarakat luas.

Salah satu hal yang juga dikritisi oleh Adams adalah mengenai bagaimana sebenarnya jika tidak terfokus pada patriarki, Weber dapat menjelaskan patrimonial dengan pandangan yang berbeda. Weber terlalu menaturalisasi patriarki, argument yang beliau tawarkan hanyalah bagaimana patrimonial sudah pasti terjadi dengan superioritas fisik dan intelektual kaum pria pada masanya. Material seperti masa kecil aktor, pengalaman historis yang spesifik mengenai pengasuhan aktor tersebut. Bagaimana ia menghadapi bentuk otoritas ayah dan orang tua saat pertama kali karena hal tersebut dapat membentuk suatu pola pada diri individu masing-masing orang. Alih-alih berfokus pada keadaan biologis pria dan figur *kebabakan* yang menghasilkan kekuatan politis, lebih baik kita lebih mendalami tentang pergeseran makna atas bagaimana kejantanan bisa dipegang menjadi suatu kunci untuk menggerakkan mesin politik bahkan pada zaman seawal mungkin seperti Yunani Kuno. Dengan kajian tersebut kita akan mengetahui lebih banyak mengenai bagaimana sistem patrimonial dapat bekerja, dan bagaimana ia runtuh tidak dapat mempertahankan suatu pemerintahan seperti apa yang terjadi pada Demokrasi Terpimpin.

Father-ruler bukan sekedar konsep yang telah terlewat ratusan tahun silam pada zaman awal kerajaan Eropa, namun masih tetap hidup disekitar kita bahkan pada ranah kompetisi politik. Yang menjadi menarik adalah representasi dari hubungan keterikatan patriarki antara penguasa bersama dengan para agen dan staf pekerjanya. Dalam analisis Weber, mereka membentuk jaringan spesifik yang

dapat mempengaruhi sistem legitimasi sehingga mereka dapat mendominasi.⁷ Demi memperthankan dominasi politik agar tetap selalu berada dibawah kontrol sekelompok orang yang berelasi, bentuk relasi terbaik dan memiliki sifat eksklusif yakni dalam relasi keluarga itu sendiri. Salah satu kepentingan para *father-rulers* untuk menyalurkan representasi politik khususnya dalam relasi politik yang dapat mengangkat aktor dalam keluarga mereka, dengan basis status *paternal* yang dimiliki oleh ‘sang ayah’ dan telah diakui secara sosial oleh masyarakat. Yang diharapkan oleh konstruksi bentuk representasi ini adalah kesuksesan berdasar garis keturunan dalam mempertahankan dominasi politik, pengaruhnya dapat ditarik ulur sepanjang waktu yang dapat mereka harapkan. ‘Sang ayah’ menentukan keturunan mana yang dapat dikembangkan sebagai aktor politik untuk meneruskan kesuksesan legitimasi politik dalam relasi keluarga. Para elit politik, staf pekerja dan agen akan memastikan kepemilikan properti, sumber, dan investasi untuk memenuhi keturunan mereka dengan berbagai kualitas dan kuantitas yang menurut mereka dapat menarik masa.

Praktik seperti ini dapat kita lihat dalam beberapa kasus politik lokal juga memiliki indikasi sistem patrimonial yang sangat kuat. Seperti penelitian yang ditulis oleh Choi Nankyung pada pemilu di Kota Depok dan Kabupaten Banyuwangi. Analisis dilakukan pada berbagai proses pemilu yakni pada tahap kandidasi, pemilihan umum, dan rekapitulasi hasil. Yang terjadi di Depok ialah elit lokal melakukan hal seperti merusak sistem legal yang dimiliki untuk mencoba memenangkan pemilu. Sementara di Banyuwangi, elit lokal memanipulasi kekuasaan mereka sehingga mempertahankan dominasi pada lembaga politik lokal. Mereka memiliki jaringan yang mampu menyebarkan sumber dan memobilisasi masa secara emosional. Yang terjadi adalah, kecurangan di kedua kota tersebut dalam proses pemilu mereka. Terjadi karena para elit politik menggerakkan mobilisasi masa dengan relasi patrimonial antar para elit lokal, mempengaruhi dinamika politik lokal di kedua daerah tersebut. Semakin

⁷Weber, M, Op.cit. 343

membuktikan bahwa demokrasi sangat rentan terhadap manipulasi politik lokal terutama politik patrimonial para elit lokal.⁸

Pada beberapa keluarga keturunan Presiden yang pernah menjabat di Indonesia diantaranya yaitu keluarga Cendana (Soeharto), Cikeas (Susilo Bambang Yudhoyono), dan trah Soekarno didalam lingkup politik nasional. Beberapa keluarga tersebut memang sudah dikenal dalam dunia politik, memiliki banyak anggota keluarga yang berperan sebagai aktor dalam kompetisi politik. Sosok yang kita kenal adalah Siti Hardiyanti Rukmana atau yang biasa akrab dipanggil Mbak Tutut. Tutut adalah anak sulung dari mantan Presiden Republik Indonesia kedua, bapak Soeharto. Dalam dunia politik sendiri, Tutut memiliki karir politik yang cemerlang. Namun semua langkah yang beliau jalani tidak dipungkiri adalah tuntunan ‘sang ayah’ yakni Soeharto. Pada tahun 1992 Tutut mulai memasuki dunia politik dan pertama kali berpartisipasi sebagai Wakil Ketua DPP Golkar, melawan kelompok reformis yang memiliki tujuan untuk membentuk partai Golkar menjadi lebih modern. Sejak saat itu Tutut mulai lebih mendalami dan berpartisipasi dalam dunia perpolitikan. Sementara Soeharto menyiapkan seluruh jalan yang akan dilewati Tutut agar lebih mulus dengan memerintahkan Jenderal Hartono untuk mendampingi Tutut. Dari sepanjang sejarah kepemimpinan Soeharto, Tutut juga memiliki tugas untuk sebaik mungkin mempertahankan kekuasaan ‘sang ayah’ serta menghadapi para pesaing-pesaing ayahnya seperti Gus Dur dan Megawati. Jika dibandingkan dengan dua saudara dan saudarinya seperti Tommy Soeharto dan Titi Soeharto, Tutut memang tidak seberapa menonjol. Namun sebenarnya Tutut yang memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan adik-adiknya dalam dunia kompetisi politik. Dan ia juga yang telah ditempa oleh Soeharto untuk berharap dikemudian hari akan dapat menggantikan posisinya sebagai orang nomor satu di Indonesia, yakni menjadi Presiden Republik Indonesia.⁹

⁸Choi, N. “Democracy and Patrimonial Politics in Local Indonesia: Pathways to Power” *Journal of Federalism*, (2009): 131-165.

⁹Fadrik Firdausi, ”Skenario Soeharto untuk Memuluskan Tutut jadi Presiden”, *Tirto ID*, 1 Maret 2018, <https://tirto.id/skenario-soeharto-untuk-memuluskan-tutut-jadi-presiden-cFo7> (Diakses 25 Mei 2019).

Bahkan sebelumnya kepemimpinan seorang perempuan dalam sistem patrimonial dianggap sebagai anomali. Sesuatu yang tidak lazim terjadi dan masih sangat jarang sekali dijumpai. Bahkan dikatakan mengkontradiksi sistem patrimonial yang ada dengan menunjuk seorang perempuan sebagai peneruh kesuksesan keturunan tersebut. Namun di zaman yang saat ini telah mengalami perkembangan dan mempengaruhi studi peran gender, sebenarnya hal ini sudah tidak menjadi masalah. Ketika sudah banyak perempuan menggantikan dan menjalankan peranan pria pada segala aspek, khususnya dalam pembahasan ini yakni meneruskan garis kesuksesan legitimasi politik dalam lingkaran keturunan keluarga tersebut. Yang perlu ditindaklanjuti oleh para aktor-aktor penerus adalah bagaimana mereka bisa mengisi kekosongan kepemimpinan yang sebelumnya diduduki oleh para pendahulu mereka. Sudah merupakan suatu isu jika kekosongan figur pendahulu mereka, seperti apa yang terjadi pada Soekarno dan keturunannya yakni Megawati. Megawati selalu berusaha mengisi peran yang dimiliki sang ayah ketika beliau menjadi Presiden pertama Republik Indonesia.

Sebenarnya bukan hanya Megawati yang di idam-idamkan para loyalis Soekarno untuk terjun ke dunia politik, Guntur anak sulung Soekarno menjadi salah satunya. Guntur sebagai anak pertama Soekarno banyak dikatakan cocok untuk menggantikan dan meneruskan legasi yang dimiliki oleh sang ayah. Sangat menabjubkan bila kita pikirkan secara logika bagaimana para loyalis Soekarno dengan gamblang mendukung Guntur dan siap memberikan dukungan mereka jika Guntur terjun ke dunia politik. Bagaimana bisa seseorang yang belum terbukti mumpuni dan belum memiliki kapabilitas dalam dunia politik mendapatkan dukungan secara otomatis dari sekelompok orang loyalis, hanya karena loyalis ini melihat ikatan hubungan keturunan. Para loyalis ini sangat merindukan figur tersebut sehingga mereka berusaha untuk mencari segala koneksi dan hubungan yang dapat mereka genggam sekecil apapun bentuk wujudnya.

Dukungan instan para loyalis Soekarno yang otomatis didapatkan oleh Guntur tentu saja dianggap oleh para aktor dan elit sebagai kesempatan dan sumber sosial yang berharga. Mendapatkan dukungan masyarakat secara otomatis

tanpa harus membuktikan kapabilitas namun dapat senantiasa memiliki sekelompok orang yang setia melakukan dan mencapai kepentingan yang dimiliki oleh sang pemimpin merupakan resep kesuksesan dalam dunia politik. Hal ini dapat dimanfaatkan dan digunakan sebagai alat sumber dalam meraih kekuasaan di dunia politik, khususnya dalam sistem demokrasi dimana masyarakat merupakan faktor penentu dan pemegang keputusan bersama. Dari hal inilah timbul bibit neopatrimonial yang dikemudian hari akan membantu Guntur bahkan anak cucu keturunan Soekarno untuk melanggengkan warisan kekuasaan sang *father figure*. Jika dinilai dari moral dan etika, tentu saja neopatrimonial ini terkesan tidak adil karena keuntungan sepihak yang didapat oleh para pemegang kekuasaan *the father* beserta garis keturunannya. Hal ini bukan hanya berpengaruh pada Guntur saja namun juga anak-anak Soekarno yang lain beserta garis keturunan mereka masing-masing, seperti contohnya, Megawati.

Pada masa pasca reformasi akhirnya Mega berhasil menjabat sebagai Presiden RI kelima, menggantikan Abdurrahman Wahid. Menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Megawati memiliki pengaruh besar didalam dunia perpolitikan Indonesia. Sebagai anak dan keturunan langsung Soekarno, beliau memiliki rasa pertanggung jawaban yang kuat untuk meneruskan kesuksesan sang ayah dalam mendapatkan legitimasi politik. Melanjutkan kiprah PDI dengan mempertahankan cita-cita Soekarno tetap menjadi mantra PDI bahkan sampai saat ini.¹⁰ Sehingga saat ini, Megawati sebagai Ketua Umum PDI memiliki peran penting yang menentukan arah tujuan PDI, serta aktor-aktor yang berperan dibaliknya. Sekitar pada tanggal 10 Januari 2018, Syaifullah Yusuf (Gus Ipul) mengumumkan bahwa beliau akan didampingi oleh Puti Guntur Soekarnoputri dalam perhelatan kompetisi politik Pemilu Gubernur Jawa Timur (Pilgub Jatim). Puti mendapat *titah* langsung dari Ketua Umum PDI yakni Megawati untuk mendampingi Gus Ipul sebagai salah satu Cawagub pada Pilgub Jatim 2018. Dalam pemberitaan pula, sangat ramai diperbincangkan ketika pertama kali mengenalkan calon pasangannya Gus Ipul menyampaikan

¹⁰Christie Stefanie, "42 Tahun Berdiri, PDIP Teruskan Cita-cita Bung Karno", *CNN Indonesia*, 9 Januari 2015, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20150109210227-32-23637/42-tahun-berdiri-pdip-teruskan-cita-cita-bung-karno> (Diakses 27 Mei 2019)

pernyataan bahwa akhirnya, kaum nasionalis dan agamis akan disatukan dengan bergabungnya Puti. Pasalnya Puti sebagai cucu Presiden pertama RI, Soekarno dan Gus Ipul sebagai cicit seorang pendiri organisasi Islam Nahdhatul Ulama (NU), digawang sebagai kombinasi yang tepat untuk memimpin Jawa Timur secara berdampingan.¹¹. Apa yang diutarakan oleh Gus Ipul menjadi penting untuk dibahas. Beliau memiliki tujuan dengan memperkenalkan Puti sebagai cucu Soekarno, karena sebelumnya Puti tidak memiliki pengalaman di daerah Jawa Timur. Jika dibandingkan dengan cawagub paslon yang lain seperti Emil Dardak yang sudah memiliki pengalaman sebagai Bupati Trenggalek pada tahun 2016-2019, beliau pun sebagai cawagub pasangan Khofifah memenangkan perhelatan Pilgub Jatim 2018 melawan pasangan Gus Ipul-Puti.

Meski mengalami kekalahan, penting bagi kita untuk mengetahui alasan dibalik keputusan yang dibuat oleh masyarakat. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika label Puti sebagai cucu Soekarno dipergunakan sebagai alat penggerak mesin politik PDI dan dipergunakan untuk memperoleh suara dan menarik simpati kepada pasangan calon Gus Ipul dan Puti bekerja diantara masyarakat khususnya loyalis Soekarno. Sistem patrimonial memang sudah terjadi pada beberapa tahun silam dan telah menjadi bagian sejarah pemerintahan Indonesia. Efeknya masih tercermin pada masyarakat yang senantiasa mendukung figur ‘sang ayah’ yang telah diakui secara sosial oleh masyarakat. Legitimasi politik yang berlanjut hingga ke aktor turunan keluarga tersebut menjadi persoalan. Karena hal ini dapat digunakan menjadi penggerak mesin politik saat jatuh ditangan para elit politik yang memperebutkan sumber dan kekuasaan. Terlebih lagi melihat pandangannya dari arah masyarakat yang memiliki hak atas suara sebagai alat legitimasi. Karena kebanyakan penelitian lebih mengobservasi dinamika antara hubungan pemimpin sebagai *the father* dan para elit politik yang mempertahankan gerak mesin politik disekitar pemerintahan pemimpin tersebut.

¹¹Joko Sasongko, “PKB Yakin Puti Sukarno Dongkrak Elektabilitas Gus Ipul”, *CNN Indonesia*, 10 Januari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/pilkadaserentak/nasional/20180110140326-32-267890/pkb-yakin-puti-sukarno-dongkrak-elektabilitas-gus-ipul?> (Diakses 27 Mei 2019)

1.2. Rumusan Masalah

- 1.2.1. Se jauh mana figur Soekarno dapat dipercaya oleh loyalis Soekarno dan berperan sebagai penggerak kompetisi politik untuk menarik simpati pemilik hak suara pada Pemilu Gubernur Jawa Timur 2018?
- 1.2.2. Bagaimana politik patrimonial bekerja pada Pemilu Gubernur Jawa Timur 2018?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui sejauh mana kepercayaan loyalis Soekarno terhadap figur Soekarno dapat menggerakkan mesin politik pada Pemilu Gubernur Jawa Timur 2018
- 1.3.2. Untuk mendeskripsikan bagaimana politik patrimonial bekerja pada Pemilu Gubernur Jawa Timur 2018.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Dapat menjelaskan sejauh mana kepercayaan loyalis Soekarno terhadap figur Soekarno dapat menggerakkan mesin politik dan memberikan suara Puti Guntur Soekarno pada Pemilu Gubernur Jawa Timur 2018.
- 1.4.2. Dapat mendeskripsikan kinerja politik patrimonial pada Pemilu Gubernur Jawa Timur 2018.

1.5. Konseptualisasi

1.5.1. Patrimonialisme

Merupakan suatu konsep yang menjelaskan tentang fenomena pemimpin yang memiliki peran sebagai *the father* dan memperlakukan bawahannya (*subordinates*) dengan hubungan yang sama bentuknya seperti hubungan antara seorang ayah dengan keluarganya. Administrasi dan kepengurusan negara yang juga didistribusikan

seakan kepengurusannya diatur oleh sanak keluarga itu sendiri. Sifatnya sangat eksklusif, dengan jajaran staf dan elit politik yang dimiliki oleh pemimpin tersebut memiliki satu tujuan yakni meneruskan legitimasi politik yang telah mereka dapat. Mengkonstruksi suatu sistem yang melahirkan aktor-aktor politik dari beberapa keluarga keturunan langsung dari pemimpin tersebut. Sistem ini sangat terkenal di antara monarki Eropa Barat yang menggariskan suksesi kepemimpinan kerajaan mereka berdasar atas keturunan. Dari sang ayah menuju ke kepemimpinan anak lelaki yang akan menjadi ayah dan begitu seterusnya. Berikut lahirnya konsep patrimonial pada sistem pemerintahan kerajaan di Eropa Barat.

Dengan perkembangan jaman dan studi, demokrasi pun juga mulai menyebar menantang dominasi monarki yang terbangun di Eropa. Konstruksi patrimonial semakin berubah dengan adanya sistem demokrasi, yang juga dibawa oleh negara-negara Barat menuju Negara Dunia Ketiga (*Third World Country*). Kebanyakan dari Negara Dunia Ketiga ini sedang dalam proses demokratisasi pada masing-masing negara mereka.

Seperti yang terjadi pada negara *post-Soviet* yang mengalami demokratisasi. Mereka mencoba menjalan sistem ini dan bertransisi namun dalam prosesnya, ketidakstabilan yang dialami negara-negara ini menyebabkan negara mereka mencerminkan kecenderungan sistem semi-patrimonialisme pada sistem pemerintahan mereka.¹² Karena pada dasarnya sistem patrimonial sudah ada bahkan sebelum kejatuhan rezim Soviet itu sendiri, sehingga transisi yang tidak sempurna tersebut melahirkan semi-patrimonial yang bersembunyi dibalik selubung demokrasi pada pemerintahan mereka.

Terbukti pada bagaimana elit politik dan presiden sebagai kepala pemerintahan mereka menggunakan kekuasaan untuk

¹²Fisun, Oleksandr, Op.cit. 2.

memutuskan kebijakan yang sesuai dan mendukung kepentingan mereka. Pemisahan antara sektor pribadi dan publik yang kurang jelas juga merupakan indikasi bahwa sistem patrimonial menyusup didalam pemerintahan demokratis negara-negara *post-Soviet*.

Seperti penjelasan Weber, mengenai patrimonialisme dan neo-patrimonialisme, permasalahan ekonomi dan politik yang mulai meluas mengembangkan kemungkinan-kemungkinan patrimonial. Neo-patrimonialisme adalah pengembangan dari studi mengenai patrimonial yang menghadapi polemik dan permasalahan dengan variabel yang baru sehingga lahir gagasan baru patrimonial ini. Indonesia sendiri mengalaminya pada masa transisi demokrasi yakni kepemimpinan Soekarno Demokrasi Terpimpin.

Patrimonialisme tradisional sangat erat kaitannya dengan kepemimpinan Soekarno pada masanya. Megahnya pembangunan monumen nasional dan Istana Merdeka sebagai pusat pemerintahan negara pada saat itu bertujuan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa *wahyu* masih ada dan dipegang oleh Soekarno. Mendapat sebutan sebagai Putra Sang Fajar, membuat keyakinan bahwa beliau yang ditakdirkan untuk membawa Indonesia kembali ke kejayaan semakin menguat. Itulah keadaan masyarakat Indonesia pada saat itu, sangat percaya akan tradisi dan keyakinan tradisional.

Namun ketika tiga kelompok masyarakat yakni, komunis, nasionalis, dan agama, saling bertikai antar satu sama lain, Soekarno mulai memikirkan jalan yang tepat untuk mempertahankan kestabilan negara pada saat itu. Pengerahan militer pun dilakukan oleh beliau, untuk melawan kekuatan oposisi yang mulai berkembang yakni Partai Komunis Indonesia yang menarik simpati masyarakat dengan memperjuangkan hak rakyat kecil pedesaan yang tanahnya telah diambil hak miliknya oleh penjajah kolonial. Kestabilan negara mulai kembali hancur ketika gerakan 30 September (G30S PKI) dilaksanakan oleh para anggota PKI.

Pembantaian oleh para militer terhadap anggota PKI dan PKI terhadap tujuh jendral militer Indonesia terjadi. Soekarno yang tidak lagi bisa mempertahankan kestabilan negara dengan karisma dan pengaruhnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden. Sistem patrimonial tradisional yang gagal dalam pemerintahan Indonesia.¹³

Masa kepemimpinan Soeharto juga menorehkan sejarah panjang perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dalam hal patrimonial. Dalam pemerintahan Soeharto yang telah mengalami dinamika dalam aspek ekonomi dan politik, cerminan neo-patrimonial lebih terlihat dalam sistemnya.

Konstruksi politik hingga megawali pada masa jabatan beliau yang hampir 32 tahun tidak tergoyahkan membuat masyarakat yakin bahwa ada sesuatu dibalik rezim kepemimpinan Soeharto. Beliau membangun rezim tersebut dengan menggunakan para bawahan dan elit politik yang beliau percaya untuk mendukung kepemimpinan dan legitimasi yang beliau dapat. Dapat dikatakan beliau menjadi tokoh yang mengimplementasikan patrimonial pada keluarga keturunan beliau dengan membentuk anak keturunan menjadi aktor-aktor yang dapat mendominasi dunia politik di Indonesia. Dengan kerjasama elit politik dan staf yang setia kepada beliau, dominasi legitimasi politik dapat dengan mudah didapatkan. Namun reformasi membuat beliau secara terpaksa mengundurkan diri dari jabatan sebagai Presiden. Meskipun begitu anak keturunan beliau tetap lahir menjadi aktor politik yang sangat berpengaruh pada perpolitikan negara kita.¹⁴

Hal inilah yang menjadi implikasi sistem patrimonial di negara kita saat ini. Aktor-aktor keturunan langsung dari kepemimpinan 'sang ayah' yang ingin melanjutkan legitimasi politik yang mereka dapat selama mungkin. Ditarik ulur efeknya, selama mereka meraih keberhasilan dan mencapai kepentingan mereka. Patrimonial

¹³Crouch, H. "Patrimonial and Military Rule in Indonesia", *World Politics* 31, No. 4 (1979): 571-587

¹⁴Ibid., pp 575.

mengandalkan beberapa hal berikut dalam pelaksanaannya yakni, masa yang pasif secara politis. Tidak memiliki pengetahuan mengenai politik dan sangat kurang dalam partisipasi. Masyarakat seperti ini sangat mudah untuk dipengaruhi dan diatur sesuai dengan keinginan seorang pemimpin tersebut. Karena masyarakat sangat terbelakang secara sosial dan tidak mau berpartisipasi aktif dalam keputusan politik yang dibuat. Kedua adalah elit yang mampu menjaga hubungan *patron-client* dalam sistem patrimonial tersebut.

Elit politik membantu konstruksi yang diperlukan untuk berusaha meneruskan legitimasi yang ada pada satu tempat terkonsentrasi yakni didalam keluarga sang pemimpin itu sendiri. Karena relasi keluarga sebagai relasi termudah untuk membagi distribusi sumber dan kekuasaan sehingga semua keuntungan terpusat pada lingkup keluarga dan elit politik tersebut. Patrimonial yang saat ini berubah dalam hal jenis kelamin penerus keturunan keluarga. Laki-laki dan perempuan, yang mana pun ditunjuk oleh 'sang pemimpin' asal dapat meneruskan kesuksesan politis keluarga tersebut. Tentu pada masanya hal tersebut bahkan dianggap sebagai suatu hal yang tidak mungkin terjadi dan sebenarnya sebuah kontradiksi terhadap patrimonial. Meskipun pengembangan studi gender mengkontradiksi patrimonial, namun sistem ini akan terus hidup dan menginfiltrasi kehidupan masyarakat.

1.5.2. Neopatrimonialisme

Neopatrimonial muncul sebagai bentuk baru patrimonialisme dan sebuah konsep yang menjelaskan lebih jauh lagi pengaruh patrimonial dengan variabel dan masalah yang telah dikembangkan. Modernisasi membawa permasalahan baru dan tantangan baru, sehingga mampu mengubah arah dan *discourse* dari patrimonialisme. Beberapa perubahan yang terjadi adalah ketika sistem demokrasi mulai tersebar, membuat hampir seluruh Negara Dunia Ketiga bergejolak dan

mengalami transisi ke sistem baru tersebut yakni demokrasi. Hal ini membawa beberapa pengaruh patrimonial yang masih tersisa dan memberikan bentuk baru dengan sedikit perubahan.

Para elit dengan tujuan kepentingan mereka saling memanipulasi transisi demokrasi yang sedang terjadi, mereka menginfiltrasi dengan memasukan kepentingan-kepentingan yang ingin mereka capai pada penentuan dasar konstitusional maupun regulasi yang sedang terjadi pada suatu negara yang sedang mengalami transisi tersebut. Dengan regulasi yang berpihak dan mendukung kepentingan mereka, dominasi dapat dengan mudah dicapai sehingga hal inilah yang melahirkan kembali patrimonialisme dengan *cover-up* transisi demokrasi. Hubungan *patron-client* antara para elit dan pemimpin patrimonial semakin membuat patrimonialisme tumbuh berkembang dan tidak akan hilang pengaruhnya.¹⁵

Bentuk yang akrab dikenal sebagai bentuk baru patrimonial yakni neopatrimonialisme. Jika dibandingkan dengan patrimonial tradisional yang memiliki pemimpin bersifat absolut, neopatrimonial cenderung mengkonstruksi sistem dan keadaan disekitar untuk menghadirkan keabsolutan seorang pemimpin tersebut. Dalam patrimonial tradisional, seorang pemimpin sudah pasti memiliki klaim kepemimpinan karena hak keturunan. Tidak perlu lagi masyarakat mempertanyakan legitimasi mereka, sudah jelas mereka memimpin sebagai raja karena mereka adalah anak raja, dan anak raja sebelumnya.

Sekarang kita bayangkan di jaman dengan perubahan ekonomi dan sistem demokrasi yang baru saja tersebar, apa yang berbeda? Yang berbeda ialah pemimpin sekarang harus bisa mengkonstruksi legitimasi tersebut. Masyarakat punya hak untuk mempertanyakan legitimasi yang dimiliki oleh seorang pemimpin, karena mereka lah yang menentukan dan memiliki hak suara. Ketika legitimasi ada

¹⁵Ibid., pp 572.

ditangan masyarakat, pemimpin patrimonial mencoba menemukan hal yang dapat menarik suara masyarakat tersebut. Mereka beralih pada seseorang yang mendapat kontak langsung dengan masa, yakni para elit.

Dengan hubungan *patron-client* yang telah mereka jalin, maka dengan mudah elit dan pemimpin patrimonial bekerja sama untuk mendapatkan legitimasi. Bukan hanya itu, elit juga mampu memuluskan jalan pemimpin patrimonial untuk meraih kekuasaan dengan mempengaruhi pemerintahan dan regulasi yang ada untuk berperan sesuai dengan kepentingan mereka.

Membangun konstruksi sistem patrimonial dibawah tudung transisi demokrasi, mempengaruhi masa untuk meletakkan kepercayaan mereka pada sang *patron*. Jika mereka ingin melanggengkan legitimasi yang mereka dapat kepada anak keturunan mereka, hal tersebut juga dapat dilakukan. Elit dan staf pekerja dibawah kepemimpinan sang pemimpin keluarga akan terus-menerus mengkonstruksi sistem dan kondisi di sekeliling mereka. Sehingga masyarakat tidak hilang kepercayaan pada keluarga tersebut. Meneruskan cita-cita hingga terbentuk suatu dinasti politik dengan aktor para keturunan-keturunan mereka sendiri. Hal-hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk neopatrimonial yang dapat dengan mudah kita temui didalam kehidupan pemerintahan negara kita.

Bukan hanya itu, penggunaan kekuatan militer sebagai salah satu pendukung kepemimpinan mereka juga merupakan salah satu bentuk neopatrimonialisme. Militer yang sebenarnya berfungsi untuk mempertahankan stabilitas negara memiliki beberapa fungsi tambahan pada sistem neopatrimonial. Mendukung dan mempertahankan kepemimpinan sang pemimpin patrimonial dan anak keturunannya selama yang mereka kehendaki. Kekuatan militer yang loyal pada satu pemimpin absolut membuat hal ini dapat dengan mudah dikonstruksikan. Bukan hanya itu, militer yang memiliki kedudukan dalam kursi pemerintahan juga merupakan indikasi sistem

neopatrimonial yang sudah mengalami perkembangan dan banyak perubahan. Karena dengan kedudukan militer yang loyal pada sang pemimpin pada kursi pemerintahan, dominasi dapat dengan mudah didapat dan dipertahankan.

Neopatrimonialisme menjadi bentuk baru untuk mengaplikasikan bentuk dominasi terhadap masyarakat yang sudah mengalami perubahan demokrasi. Banyak sekali pemimpin yang masih ingin menjadi 'raja' diatas para masyarakat dan sistem yang sudah progresif ini. Faktanya, patrimonial tidak akan hilang pengaruhnya dan akan seterusnya melahirkan bentuk-bentuk baru dikemudian hari ketika dihadapkan pada tantangan baru.

1.5.3. Pemilihan Umum Kepala Daerah

Sebagai salah satu jabatan publik yang bertugas menjalankan fungsi dan tugas sebagai kepala pemerintahan di daerah serta mengatur administrasi setiap bagian masing-masing daerah tersebut. Memiliki beberapa label yang berbeda sesuai dengan status di setiap daerah yang ia pimpin. Seorang Gubernur jika beliau memimpin daerah Provinsi, seorang Bupati jika beliau memimpin Kabupaten, dan Wali Kota ketika ia memimpin daerah Kota. Jabatan Kepala Daerah didampingi oleh seorang Wakil Kepala Daerah dalam masa jabatannya. Untuk mengisi kedua jabatan tersebut, telah ditetapkan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang dipilih tentu saja secara langsung oleh masyarakat sebagai proses pemilihan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dapat memperebutkan kedua jabatan tersebut. Syarat dan ketentuan dari Pilkada telah diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilu Kepala Daerah.¹⁶

Pilkada menjadi penting dalam memajukan kualitas birokrasi pemerintahan Indonesia karena mendukung partisipasi politik dan persaingan politik hingga menuju tingkat daerah. Berjalannya Pilkada langsung sangat penting demi mendukung demokratisasi sampai di

¹⁶Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 *tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah*.

tingkat daerah dan dapat memberikan keragaman yang menonjol pada kompetisi politik yang terjadi pada saat Pilkada. Yang dimaksud adalah setiap daerah memiliki kepentingan bersama dan kebutuhan masing-masing yang berbeda di setiap daerah. Dalam kesempatan Pilkada ini, masyarakat dapat secara langsung ikut serta dalam penentuan keputusan dan memilih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan mereka, agar kebijakan maupun regulasi yang ditentukan lebih mencerminkan setiap daerah tersebut. Pilkada yang demokratis dan sesuai dengan kepentingan bersama publik akan tercapai di setiap daerah.

1.5.4. Politik Lokal

Setelah melalui beberapa dekade dalam pembentukan sistem politik dan administrasi, politik demokrasi diputuskan menjadi salah satu sistem yang paling mencerminkan politik pemerintahan Indonesia. Pasca rezim Orde Baru pada tahun 1998, yang ditemukan sebagai suatu jalan keluar dan upaya pembentukan baru Indonesia ialah yakni politik lokal merupakan salah satu aspek penting untuk merayakan demokrasi. Yang dimaksud merayakan demokrasi adalah dikatakan politik lokal dapat meningkatkan partisipasi politik dan dapat menambah tingkat persaingan partai politik. Dua aspek ini sangat penting untuk mensukseskan demokrasi dan sebagai gagasan struktur yang baik untuk mempertahankan dua hal yang telah hilang dalam Orde Baru yakni partisipasi masyarakat dan politisasi partai politik. Partisipasi masyarakat yang dulunya sangat minim bahkan nihil dalam dunia politik diharapkan dapat meningkat dengan adanya politik lokal. Semua masyarakat di seluruh daerah berhak menentukan pilihan dan keputusan mereka sesuai dengan kepentingan umum daerah tersebut.

Dengan melatih partisipasi politik masyarakat, hal tersebut sekaligus dapat mendidik masyarakat mengenai pentingnya keputusan dan pilihan setiap individu pada pemilu karena hal tersebut berhubungan langsung dengan representasi politik yang dihasilkan. Politik lokal

membuat semua proses tersebut menjadi lebih tercermin, melahirkan kehidupan sistem demokrasi yang sangat baik pula. Terjadi proses *check and balance* yang sangat membantu mengembangkan politik pemerintahan Indonesia.

Sementara aspek selanjutnya yakni kembalinya politisasi partai politik menghidupkan suasana persaingan partai politik dalam pemilihan umum (pemilu) yang sebelumnya didominasi oleh satu partai yang partikuler. Masyarakat memiliki banyak pilihan dan dapat menimbang keputusan dengan lebih maksimal menghasilkan kualitas representasi yang juga memuaskan. Banyaknya pilihan membuat masyarakat semakin menimbang keputusan politik mereka secara otomatis membuat mereka lebih terlibat dalam partisipasi politik. Politik lokal melahirkan pemimpin-pemimpin dan penerima jabatan yang lebih memiliki kapabilitas karena masyarakat yang aktif dalam berpartisipasi politik. Maka sebenarnya dapat dikatakan politik lokal membantu mempertahankan stabilitas sistem demokrasi di Indonesia.

1.5.5. Soekarnoisme

Yakni dikenal sebagai sekelompok masyarakat yang menganut aliran cita-cita dan paham ajaran Soekarno. Mulai muncul pada jaman Demokrasi Terpimpin ketika kekuatan PKI mulai bangkit, sehingga media pada saat itu mencoba untuk melawan paham PKI yang mulai berkembang dengan menerbitkan rubrik pada Koran Pesat oleh Sayuti Melik berisi tentang ideologi dan paham Soekarno. Disebutnya paham aliran tersebut menjadi Soekarnoisme, yang pada saat itu juga didukung oleh tokoh seperti Sumanoro dan Adam Malik, bersama-sama mereka mencetuskan Badan Pendukung Soekarnoisme (BPS). Terjadi banyak perdebatan antar pers mengenai kemunculan BPS ini. Salah satu media pemberitaan *Harian Rakyat*, bahwa para pengikut organisasi BPS menyebarkan paham Soekarnoisme yang salah dan merupakan bentuk penghinaan terhadap ajaran Soekarno.

Perdebatan antar pers Indonesia terjadi hingga banyak pihak menilai tulisan media PKI ini benar adanya dan BPS menyebarkan paham yang dianggap salah. BPS menerima banyak kecaman, muncul banyak demonstrasi yang mengkecam BPS dan menuntut untuk membubarkan BPS. Pada awalnya Soekarno menyetujui aksi pers BPS ini, karena beranggapan bahwa paham yang disebarkan adalah paham yang dianut oleh beliau sendiri. Hingga pada akhirnya Soekarno membubarkan semua surat kabar dan organisasi BPS. Berdasar pada asumsi bahwa BPS dituduh oleh Soekarno telah mencoreng tujuan dan arti sebenarnya dari paham Soekarnoisme. BPS menjadi organisasi penganut Soekarnoisme bersifat anti-PKI yang dibubarkan oleh Soekarno.

Soekarnoisme yang berakar dari pemikiran dan ideologi Soekarno juga sering disebut sebagai Marhaenisme. Ditemukan oleh Soekarno, sebagai ideologi yang menjunjung persatuan nasional dan mendukung hak demokratis sebagai perlawanan atas otoritarianisme. Sifat Soekarno sangat tercermin dari pemikiran tersebut bagaimana beliau mengkombinasikan aspek Barat dan Timur didalam ideology Marhaenisme.¹⁷ Penganutnya disebut sebagai kelompok Marhaens. Ideologi ini muncul kembali dalam cerminan Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) dan sempat juga mengikuti kompetisi Pemilu Legislatif pada tahun 1999, 2004, dan 2009.

Hingga saat ini Soekarnois, yakni penganut paham Soekarnoisme, masih aktif dalam mendukung cita-cita Soekarno dan berpartisipasi politik. Puti juga sempat memanggil kelompok Soekarnois dan meminta dukungan mereka pada pencalonannya sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur 2018.¹⁸ Meminta agar para kelompok Soekarnois saling bekerja sama memenangkan Puti dalam Pemilu Gubernur Jawa Timur 2018. Terbukti sekali bahwa para loyalis

¹⁷Holt, C. *Culture and Politics in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing, 2007.

¹⁸Achmad Faizal, "Puti Kumpulkan para Soekarnois Jatim", *Kompas*, 23 Januari 2018, <https://regional.kompas.com/read/2018/01/23/17145871/puti-kumpulkan-para-soekarnois-jatim> (Diakses 12 Juni 2019)

penganut Soekarnoisme ini masih eksis dan berpartisipasi di dunia politik. Mereka yang akan selalu setia menggerakkan mesin politik PDI yang membawa cita-cita Soekarno agar selalu berjaya dalam perpolitikan Indonesia.

1.6. Kerangka Teori

1.6.1. Politik Neopatrimonial

Patrimonial awalnya hanya menjelaskan tentang pengaruh seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan dan mempratikkannya dengan sistem administrasi yang bekerja seperti peran keluarga. Namun secara perlahan patrimonial mulai memiliki akar pada sistem pemerintahan. Sistem ini dapat dijelaskan dengan kondisi-kondisi sekitar, dapat diprediksi, dan digambarkan langkah selanjutnya. Berkembang menjadi sebuah teori yang dapat menjelaskan beberapa kecenderungan pemimpin pada suatu pemerintahan. Sebelumnya patrimonial tidak terlalu menonjol dalam fenomena-fenomena politik karena beberapa jaman yang lalu, pengaruh monarki masih kuat terutama di negara-negara Eropa. Masyarakat masih melihat kepemimpinan seorang raja menjadi suatu hal yang lazim dan tidak menemukan gejolak pada kepemimpinan monarki tersebut. Para monarki tersebut dilihat sebagai tokoh yang sudah ditakdirkan untuk memimpin, tidak ada yang mempertanyakan legitimasi yang mereka dapat. Mungkin hanya beberapa penelitian yang ingin lebih jauh melihat bagaimana sistem monarki bekerja, namun selebihnya tidak ada pertanyaan mengenai mengapa hanya beberapa aktor spesifik ini yang harus memimpin.

Weber mengaitkan patrimonialisme yang erat kaitannya dengan birokrasi legal-rasional. Argumen yang dijelaskan oleh Weber adalah patrimonialisme memiliki beberapa perbedaan jika dibandingkan dengan birokrasi legal-rasional. Weber menggunakan istilah 'birokrasi patrimonial' untuk menjelaskan perbedaan diantara kedua terminologi

tersebut. Sedikit perbedaan dari kedua istilah tersebut terletak pada perubahan beberapa karakteristik dalam rikorasi patrimonial jika dibandingkan dengan birokrasi legal-rasional

Birokarsi patrimonial lahir ketika bentuk hubungan patrimonial mulai menyebar dan memasuki ranah sistem politik dan administratif yang telah dibentuk secara formal oleh birokrasi legal-rasional. Sehingga para pejabat yang memegang posisi dalam birokrasi tersebut akan mengoperasikan fungsi mereka dengan berbeda karena telah terpengaruh oleh unsur hubungan patrimonial yang memasuki birokrasi. Menggunakan kekuasaan yang mereka miliki sejauh mungkin menggeser yang awalnya merupakan pelayanan publik menjadi bentuk aktivitas demi kepentingan pribadi.¹⁹

Hubungan yang seharusnya bersifat legal-rasional dan berjalan sesuai fungsi seperti atasan dan *subordinates* antar sesama pejabat birokrasi akan jatuh pada kategori patrimonial dengan pola yang menyerupai *client* dan *patron*. Dan perilaku yang ditunjukkan dalam organisasi birokrasi akan menunjukkan persaingan antar status pribadi, daripada pelaksanaan fungsi formal.²⁰

Legal-rasional dan patrimonialisme memang telah memunculkan banyak perdebatan dikalangan para peneliti. Umumnya perdebatan tersebut muncul karena diyakini bahwa definisi neopatrimonialisme terletak pada dominasi yang menguat pada patrimonialisme dan melemahkan birokrasi legal-rasional. Neopatrimonial adalah penggabungan kreatif antara dua tipe dominasi Weberian yakni dominasi patrimonial yang mengarah ke subtipe tradisional dan dominasi birokrasi legal-rasional.

Dalam istilah Weberian, neopatrimonial dapat dijelaskan lebih mendalam sebagai campuran antara dua jenis dominasi yang saling terjalin dan hidup berdampingan yakni dominasi patrimonial dan dominasi birokrasi legal-rasional. Dibawah patrimonial, segala

¹⁹ Erdmann, G. Engel, U "Neopatrimonialism Revisited: Beyond a Catch-All Concept", *Giga Research Program: Legitimacy and Efficiency of Political System*, No. 16 (2006).

²⁰ Ibid.,

hubungan kekuasaan hanya ada diantara ‘sang pemimpin’ dan ‘yang dipimpin’. Semua hubungan administratif dan politis yang terbentuk bersifat pribadi, tidak ada pembeda antara ranah publik dan privat. Namun hal tersebut sangat berbeda dengan bentuk barunya yakni neopatrimonialisme yang menunjukkan bahwa masih ada perbedaan diantara ranah publik dan privat, paling tidak secara formal.

Neopatrimonial masih beroperasi dalam kerangka kerja dan klaim dari birokrasi legal-rasional. Struktur formal dan peraturan masih berlaku, walaupun dalam prakteknya terkadang pemantauan pemisahan sektor publik dan privat kurang dipantau secara berkala. Dengan kata lain, dua sistem ini saling berdampingan, segala aspek hubungan privat di sisi patrimonial, dan aspek legal-rasional di birokrasi. Sistem patrimonial memasuki sistem legal-rasional dan mempengaruhi hasil akhir serta logika sistem tersebut, namun tidak menggantikan logika legal-rasional secara keseluruhan. Idealnya individu dapat menentukan pilihan mereka berdasar logika yang menurut mereka dapat membantu mencapai tujuan dan mewujudkan kepentingan mereka secara maksimal.²¹

Weber juga menjelaskan bagaimana patrimonial hadir sebelum birokrasi modern. Berdasar pada kesetiaan loyal yang bersifat personal, bukan merupakan bentuk komitmen resmi yang memiliki tujuan bersifat umum.²² Segala kepentingan dalam patrimonial bersifat personal, tidak ada kepentingan umum dalam hubungan ini. Menjadi salah satu sifat patrimonial tradisional yang dijelaskan oleh Weber yakni aset privat dan fasilitas publik yang tidak dipisahkan.

Pada politik pemerintahan Soekarno, dengan pengaruh patrimonialnya beliau mengkonstruksikan Demokrasi Terpimpin. Soekarno menonjolkan sifat patrimonial tradisional dengan keyakinan bahwa beliau sebagai pemegang *wahyu* yang dapat mengembalikan Indonesia kepada masa kejayaannya. Menjadi menarik ketika kita melihat respon masyarakat mengenai keyakinan tradisional bahwa

²¹ Ibid.,

²²Weber, M, Op.cit. 1006.

Soekarno merupakan pemimpin yang diutus karena nyatanya masyarakat sangat mempercayai hal ini dan memberikan Soekarno hal yang beliau butuhkan yakni legitimasi untuk memimpin di atas tanah Indonesia. Kepemimpinan Soekarno dalam pemerintahan Indonesia memang mencatat sejarah karena pada masa inilah Indonesia mengalami transisi demokrasi, masa yang sangat penting dalam sejarah berdirinya negara ini. Masyarakat selalu terkagum akan sosok yang tangguh dan berani melawan penjajahan pada saat itu dan bangkit membangun negara dengan peristiwa Proklamasi sehingga akhirnya Indonesia dapat merdeka.

17 Agustus 1945 merupakan peristiwa bersejarah serta awal bagi karir Soekarno dalam dunia perpolitikan Indonesia. Masyarakat tertarik pada charisma dibalik orang nomor satu di Indonesia pada saat itu. Weber juga menjelaskan bagaimana patrimonial tradisional dapat didasarkan pada charisma yang dimiliki seorang aktor tersebut. *The father of the people*, menjadi mantra yang akan selalu dibawa oleh masyarakat pada saat itu ketika melihat sosok Soekarno. Sangat kharismatik, cocok menjadi pemimpin, dan menjadi gambaran bagaimana masyarakat otomatis tunduk pada konsep ini karena adat tradisional Jawa masih sangat melekat pada karakteristik negara Indonesia pada saat itu. Segala konsep mengenai *wahyu* sangat menggambarkan adat tradisional Jawa. Hingga masa jabatannya berakhir pun Soekarno masih memiliki pengikut loyal percaya akan pengaruh dan cita-cita yang masih akan dia bawa. Pemerintahan Demokrasi Terpimpin pada saat itu jatuh dibawah kerusuhan antara PKI (Partai Komunis Indonesia) dan militer. Nyatanya kharisma saja tidak cukup untuk mempertahankan stabilitas suatu negara.

Ada banyak sekali masalah-masalah yang ditemukan pada pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Jatuhnya patrimonialisme dalam mempertahankan stabilitas negara pada saat itu erat kaitannya dengan beberapa karakteristik patrimonial yang tak dapat terpenuhi. Keseimbangan ekonomi sama sekali tidak ditemui pada masa

pemerintahan Demokrasi Terpimpin. Konflik politik yang terjadi pada saat itu membuat para elit dan Soekarno sebagai pemimpin tidak dapat membangun regulasi ekonomi yang dapat membantu negara pada saat itu. Beberapa catatan penting yakni kestabilan ekonomi sangat penting untuk kestabilan negara itu sendiri. Dan salah satu sumber dari sistem patrimonial adalah pemanfaatan sektor publik sebagai sumber yang penting untuk kehidupan negara. Mungkin juga untuk mencapai kepentingan pribadi, karena dalam sistem patrimonial kepentingan umum tidak ada dan dengan sengaja tidak dihadirkan.

Dalam tulisan Crouch, ia yakin bahwa patrimonial memiliki beberapa aspek yang harus dipenuhi demi stabilitas yang awet. Berikut juga merupakan bentuk baru dari patrimonial yang sebelumnya sangat bersifat tradisional, dengan menjawab tantangan baru maka muncul bentuk patrimonial baru yakni neopatrimonial. Sempat dibicarakan oleh Weber bahwa neopatrimonial sebagai sistem yang dapat melalui tantangan jaman dan akan selalu membawa konsep patrimonial berdampingan dalam kehidupan politik dan pemerintahan negara. Neopatrimonial memiliki beberapa aspek dan karakteristik yang sebelumnya menjadi permasalahan pada sistem patrimonial tradisional. Berikut adalah beberapa karakteristik yang diyakini Crouch dapat melanggengkan sistem patrimonial pada pemerintahan dan politik:

1. *Depolitisasi*: Pasca pembantaian oleh PKI pada tahun 1965, militer mulai melakukan operasi untuk melawan pihak-pihak yang menentang kepemimpinan absolut yang baru saja dibentuk pada tahun 1967. Dengan kekuatan koersif memaksa seluruh pihak untuk menyetujui dan mendukung pemimpin yang dipilih pada saat itu. Kekuatan militer ini membuat hampir seluruh partai politik setuju atas pemimpin yang terpilih. Peran partai sangat pasif dan memiliki suara yang kolektif mengakibatkan persaingan politik yang menurun dan dominasi digenggam oleh satu partai politik yakni Golkar sebagai partai yang selalu meraih kemenangan

dengan manipulasi banyak regulasi mengenai Pemilu (Pemilihan Umum) demi legitimasi jabatan yang panjang umur.

2. *Elit Politik*: Elit menjadi faktor kuat untuk stabilitas patrimonial karena dengan elit, keputusan dan kebijakan dapat diatur sesuai dengan tujuan kepentingan pemimpin tersebut. Dengan diiringi oleh hubungan *patron-client* yang terjalin antara para elit dan sang pemimpin, hal ini dapat dengan mudah dicapai. Manipulasi kebijakan dan regulasi sangat penting bagi kelangsungan sistem patrimonial. Karena hal ini dapat memastikan dominasi terhadap pemerintahan tetap ada ditangan sang pemimpin.
3. *Tren dalam regularisasi*: pembiasaan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh para elit dan pemimpin patrimonial. Ekonomi menjadi salah satu aspek negara yang sangat penting. Ketika Orde Baru membereskan semua konflik politik pasca Demokrasi Terpimpin, kestabilan ekonomi tidak begitu saja mereka capai. Banyak upaya dilakukan oleh pemerintahan untuk mengembalikan kestabilan ekonomi. Dengan banyak cara yakni perluasan ekonomi modern dengan bantuan asing, investasi asing, dan naiknya harga minyak. Namun investor tidak dengan begitu saja berinvestasi tanpa jaminan keamanan dan prediktabilitas. Kapitalisme industrial yang ingin masuk ke Indonesia meminta kepercayaan akan regulasi yang ada, dan fungsi legal yang dapat diprediksi, sehingga mereka mendapat kemudahan dalam menjalankan bisnis di Indonesia. Semua ini dapat dicapai dengan kelihaian para elit untuk membentuk kebijakan dan regulasi sesuai dengan kebutuhan bisnis. Menjadi salah satu ciri patrimonial, yakni sektor publik dan privat yang tidak dapat terpisah. Banyak diantara para pemilik bisnis adalah para petinggi militer dan kroni-kroni Soeharto.
4. *Masa yang pasif*: Masa dan masyarakat pedesaan pada area *rural* terisolasi dari dunia politik. Masyarakat Indonesia sudah mengalami banyak dinamika politik seperti okupasi oleh para penjajah asing, kompetisi politik yang intens pada masa demokrasi

parlementer, mobilisasi masa pada Demokrasi Terpimpin, bangkit dan jatuhnya politik komunis. Sehingga timbul sifat kecurigaan dan *distrust* terhadap segala hal yang berhubungan dengan politik pada saat itu. Sementara politisasi pegawai negeri sipil (PNS) pada masa jaman Orde Baru semakin membuat masyarakat pasif dalam aktifitas politik karena mereka diharuskan memiliki keputusan politik yang kolektif. Hal ini merupakan salah satu aspek yang turut andil melanggengkan masa jabatan Soeharto di jaman Orde Baru.

5. *Represi yang meningkat*: Mengantisipasi kegelisahan dan perlawanan yang dialami oleh sistem patrimonial tersebut, maka stabilitas diupayakan dengan pemberlakuan militer yang koersif. Pada masanya, kekuatan militer di periode Demokrasi Terpimpin digunakan untuk melawan bangkitnya PKI yang mengancam kestabilan negara. Sementara jaman Orde Baru, kekuatan militer semakin bersifat represif. Militer juga memiliki kekuatan politis dan dapat menggunakan paksaan pada para pembangkang yang melawan kepemimpinan Soeharto.²³

Stabilitas jangka pendek yang dialami masing-masing periode Demokrasi Terpimpin dan Orde Baru membuktikan bahwa terdapat titik kelemahan pada sistem mereka. Walaupun ideologis dan teroganisir, namun kestabilan Demokrasi Terpimpin tetap dijatuhkan oleh tujuan awal dari sistem patrimonial itu sendiri. Sementara Orde Baru dengan masa yang pasif, dan depolitisasi partai politik mengalami pertarungan aset dan sektor antar para jendral dan pejabat tinggi militer ketika mereka diberikan distribusi dalam bidang bisnis untuk membantu aspek ekonomi negara.

Meskipun pada dasarnya masih terdapat sistem patrimonial atau sudah hampir birokratik, dua periode tersebut akan tetap dihadapkan oleh wabah oposisi masal yang akan langsung

²³Crouch, H, Op.cit. 576-587.

berhubungan dengan konflik dalam elit. Dalam keadaan dan skenario apapun, perlawanan akan tetap muncul baik dari pihak masa maupun didalam elit itu sendiri. Karena pada dasarnya struktur politik patrimonial berdiri diatas Indonesia yang bersifat non-patrimonial.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Fokus Penelitian

Fokus masalah utama yang ada pada penelitian ini adalah melihat elit politik mengkonstruksi pengaruh dan figur Soekarno menjadikannya alat untuk membangun citra Puti Guntur Soekarno agar terlihat lebih menarik simpati masa dengan menyematkan figur sang kakek Soekarno yang telah sudah sangat dikenal dan telah mendapat pengakuan masyarakat. Selain itu, saya sebagai penulis kajian ini juga melihat suatu perubahan dalam nilai yang dijunjung masyarakat dalam memilih calon representasi mereka. Pada dasarnya masyarakat seharusnya memilih representasi atau wakil rakyat dengan menjunjung nilai kapabilitas dan kemampuan calon kandidat dalam melakukan tugas jabatan di pemerintahan. Faktor pengaruh atas tokoh figur/tokoh keluarga yang berhubungan dengan calon kandidat tersebut, menjadi sesuatu yang mendasari penentuan keputusan mereka. Penentuan keputusan politik tidak lagi berdasar pada kapabilitas dan kemampuan calon kandidat, sehingga memberikan pengaruh pada kualitas representasi itu sendiri. Hal inilah yang layak nya patut dijadikan fokus penelitian pada kajian penulis kali ini.

1.7.2. Jenis Penelitian

Metode kualitatif digunakan dalam proses penelitian ini untuk mengetahui dengan pasti segala fenomena dan peristiwa yang terjadi sehingga peneliti lebih memahami secara mendalam penelitian yang telah dilakukan. Metode ini akan membuat peneliti merasa terlibat secara langsung mengenai kasus yang akan dikaji sehingga peneliti

lebih memiliki pengertian tentang alasan utama mengapa fenomena yang terjadi dapat menjadi dasar tindakan para masyarakat untuk menentukan keputusan politik mereka. Metode ini dinilai cocok dan dapat memberikan peneliti keuntungan dalam mengambil data yang mendalam dan secara langsung menyentuh kehidupan dan lingkungan subjek yang diteliti.

Tipe penelitian dengan deskriptif-kualitatif memiliki tujuan untuk mengungkap fenomena, fakta, variabel, dan keadaan saat penelitian berjalan sehingga data yang ditemukan dan disuguhkan adalah data dengan keadaan yang sebenar-benarnya.

1.7.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan dalam prosesnya berada di Surabaya. Alasan mengapa Surabaya menjadi lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah karena, Surabaya adalah kota dalam provinsi Jawa Timur yakni sebagai kota yang ikut serta dalam perhelatan Pilgub Jatim 2018. Surabaya juga merupakan kota yang ditetapkan sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur. Faktor penentu lain yang membuat peneliti memilih Kota Surabaya ialah karena Surabaya didominasi salah satunya oleh pendukung partai PDI.²⁴ Partai Demokrasi Indonesia (PDI) memang sudah terkenal sebagai partai nasionalis yang menjunjung tinggi cita-cita Soekarno dalam partai mereka. Dengan konsentrasi pendukung dan loyalis Soekarno yang tinggi di Kota Surabaya. Diharapkan penulis akan mendapatkan data yang sesuai dan membantu penulisan dengan lokasi penelitian yang bertempat di Kota Surabaya.

1.7.4. Subjek Penelitian

²⁴Aqwamit Torik, "Hasil Survei Pusad UM Surabaya, Elektabilitas Parpol di Jawa Timur Didominasi Dua Partai Besar", *Tribun Jatim*, 24 Januari 2019, www.google.com/amp/jatim.tribunnews.com/amp/2019/01/24/hasil-survei-pusad-um-surabaya-elektabilitas-parpol-di-jawa-timur-didominasi-dua-partai-besar?espv=1 (Diakses 28 Mei 2019)

Subjek penelitian yang ditentukan oleh peneliti adalah pihak-pihak pakar politik untuk lebih memaparkan dan menceritakan sebesar apa pengaruh kekuasaan politik yang dimiliki oleh Soekarno pada masanya dan menceritakan peran keluarga trah mereka dalam membangun dan mengembangkan Indonesia dan seberapa kuat legitimasi yang dimiliki aktor-aktor politik yang memiliki hubungan relasi keturunan keluarga. Serta, peneliti juga memilih untuk mewawancarai loyalis Soekarno untuk memaparkan pengaruh-pengaruh yang dimiliki oleh Soekarno yang tercermin pada pilihan mereka dalam memilih di Pilgub Jatim 2018. Untuk melihat pengaruh secara jelas dalam masyarakat yang menjunjung Soekarno sebagai figur penting dalam kehidupan politik mereka sehingga mempengaruhi keputusan politik mereka pula. Pegawai KPU untuk lebih mendapatkan data secara mendalam mengenai pengaruh yang ada dalam menarik suara para pemilih dan dibalik penentuan peraturan pemilu mengenai pelarangan penggunaan gambar tokoh figur Soekarno pada artikel kampanye dalam bentuk apapun. Berikut adalah daftar narasumber penelitian kali ini:

1. Siswono sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2. Sudardiman sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
3. Sherly Nafisah Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.
4. Huda Ismail Kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia.
5. Agus Ko Hariyanto sebagai Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
6. Wibowo Ariyadi S.H. sebagai warga masyarakat loyalis Soekarno.

Teknik yang digunakan peneliti dalam memilih subyek penelitian adalah dengan menggunakan teknik *snowball*. *Snowball* adalah teknik yang proses pengambilan sampelnya dengan menanyakan kepada subyek penelitian untuk mengidentifikasi subyek lain yang dapat diteliti dan memberikan data kepada peneliti. Peneliti yang melakukan wawancara penarikan data pada subyek penelitian

menanyakan informasi mengenai subyek lain yang dapat menjawab pertanyaan penelitian dan memberikan data yang dapat digunakan oleh peneliti. Subyek penelitian hendaknya akan lebih baik jika memenuhi beberapa kriteria yang diinginkan oleh peneliti. Yakni, dapat mendeskripsikan pengaruh yang dimiliki Soekarno terhadap kesuksesan legitimasi politik yang didapat oleh garis keturunannya sebagai aktor dalam kompetisi politik terutama Puti yang mencalonkan diri dalam Pilgub Jatim 2018. Serta meneliti mengenai respon KPU tentang permasalahan tersebut sehingga data yang didapatkan adalah data akurat yang diinginkan dan dapat menjawab pertanyaan penelitian sang peneliti.

1.7.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis adalah data primer yang berasal dari wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh data yang dapat menjawab pertanyaan penelitian penulis. Informan wawancara oleh penulis merupakan informan yang telah terpilih dan berkaitan langsung dengan permasalahan penelitian. Dalam hal ini tentu berkaitan dengan pencalonan Puti Guntur Soekarno pada Pilgub Jatim 2018. Serta KPU yang terlibat langsung dalam pemilu untuk menjelaskan lebih jauh lagi tentang sisi Pilgub Jatim 2018 dalam hal regulasi dan tata aturan dalam pemilihan umum. Tak lupa beberapa loyalis Soekarno, masyarakat yang menaruh cita-cita masa depan negara kita dalam hak suara mereka yang masih mendukung aktor-aktor politik memiliki kaitan erat maupun keturunan langsung Soekarno.

Data sekunder juga dipergunakan dalam penelitian ini yakni dengan menggunakan buku, jurnal internasional, statistik, berita, hasil survey oleh lembaga, skripsi, berita dalam internet (web) yang dapat menjawab pertanyaan penelitian penulis. Sebagai pendukung data primer dan dapat berperan sebagai penjelas jika data primer yang

didapat kurang mengerucutkan jawaban. Data sekunder digunakan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendalam dan diharapkan dapat membantu penulis memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam adalah proses pengambilan data dengan cara mengajukan beberapa yang dilakukan oleh pewawancara kepada informan dengan bertatap muka. Pedoman wawancara dibuat oleh pewawancara dengan menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dijawab oleh informan sehingga pewawancara dapat mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dengan melakukan wawancara mendalam pewawancara dapat setidaknya masuk kedalam lingkup lingkungan sekitar informan atau memperoleh keterangan-keterangan yang dapat mengkonstruksi realita yang dihadapi informan. Sehingga informasi yang mereka utarakan dapat menggambarkan realitas yang ada dan memberikan data yang komprehensif serta sesuai dengan realita yang terjadi.

2. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dilakukan oleh peneliti adalah berupa pengamatan fenomena yang berkaitan dengan penelitian. Peneliti melakukan analisis data yang bersifat induktif yakni analisis data berdasar pada temuan yang didapatkan dan kemudian mengalami pengembangan dengan pola tertentu. Penulis menganalisis dan membedakan antara data primer dan sekunder. Kemudian dari data tersebut dianalisis dengan berdasar pada kerangka teori yang dimiliki peneliti. Analisis dilakukan berdasar pada data hasil wawancara yang ditemukan di lapangan. Sehingga data yang didapatkan merupakan data yang ilmiah dan rasional.

Selain itu peneliti juga membahas terkait perilaku pemilih dari pandangan teori yakni voting behavior serta menjelaskan dengan konseptualisasi patrimonialisme mengkonstruksi pengaruh yang telah lama dimiliki figur Soekarno sehingga menggerakkan mesin politik Puti dalam perhelatan Pilgub Jatim 2018.

Teknik analisis data menurut Alan Bryman terbagi menjadi dua yakni, secara induksi dan *grounded theory*. Yang digunakan penulis kali ini adalah analisis secara induksi, beberapa langkahnya akan dijelaskan dalam beberapa langkah berikut:

- a. *Rough definition of research question*: Diawali dengan gambaran awal pertanyaan penelitian yang masih mentah dan belum mengalami perkembangan.
- b. *Hypothetical explanation of research question*: Penjelasan hipotetis mengenai pertanyaan penelitian tersebut.
- c. *Examination of cases*: Dalam tahap ini kasus penelitian mulai di observasi, dari kegiatan observasi tersebut hasil yang didapat dapat menuju dua arah yang berbeda yakni penemuan kasus yang menentang hipotesis (*Deviant case*) atau tidak ditemukannya kasus yang menentang hipotesis sehingga mengkonfirmasi penjelasan hipotesis sebelumnya (*No deviant case*).
- d. *Deviant Case not confirming hypothetical explanation*: Jika peneliti menemukan kasus penelitian seperti ini, maka pilihan yang tersedia ialah untuk memformulasikan kembali hipotesis penelitian sehingga dapat memproses lebih lanjut dengan hasil data yang lebih berkembang dan peneliti harus memilih diantara memformulasikan (*Reformulate*) atau mendefinisikan (*Redefinition*) kembali hipotesis tersebut. Seringkali peneliti dengan metode induksi menemui banyak kasus menentang hipotesis akan terus berulang kali mengembangkan penelitian mereka dengan *reformation* atau *redefinition*.

- e. *Hypothetical explanation redefined to exclude defiant cases*: Langkah ini hanya dilakukan ketika menemui kasus yang menentang hipotesis. Jika tidak ditemukan kasus tersebut maka penelitian terbebas akan pembentukan kembali atau pengembangan hipotesis. Langkah ini bertujuan untuk mengeliminasi kasus-kasus yang menentang hipotesis, dan membangun kembali hipotesis. Sehingga data yang didapat lebih komprehensif untuk penelitian tersebut.
- f. *End of examination case data collection ceased*: Setelah melalui proses lama pada akhirnya jika tidak ditemui kasus yang mengganjal hipotesis maka langkah berikut merupakan akhir dari analisis data dan kegiatan pengoleksian data dapat dihentikan karena semua data yang dibutuhkan telah didapat.²⁵

Analisis induksi dipilih oleh penulis karena teknik ini diperkirakan mampu menjelaskan data perolehan sehingga dapat menjawab pertanyaan penelitian. Diharapkan teknik ini juga mampu menginterpretasi data dengan sebaik mungkin. Memberikan hasil terbaik yang bisa didapat dalam penelitian ini.

²⁵Bryman, A. *Social Research Methods: Fourth Edition*. New York: Oxford University Press, 2001.